

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

**Oleh :
Tri Astuti
Mahasiswa Prodi MAP Angkatan 2013 /2014 Program Pasca Sarjana
FKIP Universitas Bengkulu**

ABSTRAK

Makalah ini berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta bagaimana peran kepala sekolah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Isi makalah ini menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat ditingkatkan dengan adanya partisipasi masyarakat. Kepala Sekolah juga sangat berperan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat.

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan ,masyarakat dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat dapat berupa sumbangan pemikiran ,tenaga ,material maupun dana yang digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ,diharapkan kualitas pendidikan menjadi semakin baik dan output yang dihasilkan juga baik.

Kata Kunci ; Partisipasi Masyarakat , Peningkatan Sarana Pendidikan.

PENDAHULUAN

Dalam memajukan pendidikan bukanlah hanya tugas guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, atau bahkan menteri pendidikan saja melainkan tugas bagi seluruh elemen masyarakat baik secara perseorangan maupun secara

kelompok. Oleh karena itu dalam pengelolaan pendidikan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu menjalin hubungan kerjasama yang saling mendukung demi majunya dunia pendidikan. Lembaga sekolah hendaknya tidak menutup diri, melainkan selalu mengadakan kontak hubungan dengan dunia luar yaitu orang tua dan masyarakat sebagai mitra penanggung jawab pendidikan. Sekolah yang mampu mengadakan kontak hubungan dengan masyarakat akan bisa bertahan lama dan bisa maju terus. Walaupun pada mulanya sekolah belum banyak punya fasilitas dan masih kecil, karena kemampuan manajernya mendekati dan bekerja sama dengan para dermawan, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang cinta akan pendidikan, dan disertai himbauan yang memikat dan rasional, maka sekolah itu bisa bertahan lama. Daya tahan ini semakin kuat kalau sekolah sudah dapat menunjukkan mutunya kepada masyarakat.

Peran masyarakat sangat diharapkan mengingat masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong kemajuan di dunia pendidikan. Selain itu pendidikan bukan hanya milik pemerintah tetapi juga milik seluruh masyarakat Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 16 yang berbunyi “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk rakyat.” Hal inilah yang mengingatkan kita bersama bahwa pendidikan tanpa melibatkan peran serta masyarakat tentu akan berjalan dengan timpang, karena perwujudan pendidikan jelas diperuntukkan bagi rakyat dan tentunya akan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Lebih jauh peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 8 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi “ Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”. Dan pasal 9 yang berbunyi “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan”.

Kita semua menyadari bahwa untuk memajukan pendidikan jelas memerlukan perencanaan yang mantap dan matang, tanpa perencanaan

pendidikan yang tepat sangat mustahil bagi suatu sekolah atau lembaga pendidikan mampu memajukan pendidikan kapanpun dan dimanapun karena perencanaan merupakan factor utama dalam suatu lembaga terutama lembaga pendidikan..

Untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang harus kita laksanakan adalah dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat, apalagi di era globalisasi sekarang ini tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan sangat besar untuk itu perlu adanya perhatian khusus untuk merespon tuntutan tersebut apabila sebaliknya maka pasti akan berdampak pada rasa pesimis dan kurangpercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut.

Berdasarkan pemikiran di atas, sangat perlu dibahas Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan Sarana Pendidikan.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan .
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan sarana pendidikan .
3. Bagaimana peranan kepala sekolah dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan operasi pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan suatu pelibatan masyarakat yang paling tinggi.

Karena dalam proses perencanaan masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan. Yang dimaksud membuat keputusan disini adalah menunjuk secara tidak langsung seperangkat aktivitas tingkat laku yang luas, bukannya semata-mata hanya membuat pilihan diantara berbagai alternatif.

Dalam hal partisipatif, perencanaan pendidikan mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target; merumuskan program-program, menilai program apakah program itu dapat mewujudkan tujuan, merencanakan dan menilai biaya dan sumber-sumber biayanya. Bentuk partisipasi dalam tahap perencanaan ini, dapat diikuti langsung oleh warga masyarakat maupun melalui lembaga yang ada seperti komite sekolah.

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Selanjutnya menurut Slamet (1994: 109), bahwa partisipasi dalam pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada sejauhmana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program-program yang telah digariskan, didalam kegiatan-kegiatan fisik. Dengan demikian, pengukurannya adalah sejauhmana masyarakat telah memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan lembaga yang bersangkutan. Sumbangan tersebut dapat berwujud uang, tenaga dan dapat pula berwujud barang. Pada umumnya yang menyumbang uang adalah golongan penduduk yang tergolong kaya. Sumbangan barang biasanya tidak terbatas pada kelas sosial tertentu tetapi tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Sedangkan mereka yang menyumbangkan tenaga biasanya berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masyarakat dapat menyumbang ketiganya dan hal ini akan berbeda-beda pada tiap daerah tergantung pada karakteristik masyarakatnya.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap operasi adalah seberapa besar masyarakat memetik manfaat dari program pendidikan yang telah dilaksanakan, seperti pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan.

2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan terbagi dalam beberapa tingkatan, dari yang bersifat non-partisipasi, sampai pada kekuasaan warga.

Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet, 1994: 82-89). Chapin mengungkapkan bahwa skala partisipasi dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat partisipasi sosial yaitu :

- 1) Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial
- 2) Kehadiran dalam pertemuan
- 3) Membayar iuran/sumbangan
- 4) Keanggotaan di dalam kepengurusan
- 5) Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.

Sedangkan menurut Goldhamer untuk mengukur partisipasi dengan menggunakan lima variabel yaitu :

- 1) Jumlah asosiasi yang dimasuki
- 2) Frekuensi kehadiran
- 3) Jumlah asosiasi dimana dia memegang jabatan
- 4) Lamanya menjadi anggota.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka yang dijadikan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah : frekuensi kehadiran dalam pertemuan, keaktifan dalam mengikuti pertemuan, keaktifan dalam kegiatan fisik, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

3. Peranan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat

Peranan kepala sekolah dalam memajukan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat ialah menjalin kerjasama yang erat dengan para tokoh masyarakat termasuk pemimpin formal masyarakat dalam rangka membina pendidikan di sekolah. Tetapi kerjasama itu tidak selalu mudah diwujudkan, sebab masih banyak hal lain yang lebih penting bagi masyarakat

untuk mereka perhatikan. Made Pidarta (2004:196) menyebutkan untuk dapat mengaktifkan tokoh-tokoh masyarakat agar ikut bekerjasama dengan sekolah dapat dilakukan dengan cara menarik perhatian masyarakat melalui mutu pendidikan yang dihasilkan oleh sekolah.

Disamping meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dalam usaha meningkatkan hubungan dengan masyarakat, para manajer sekolah dapat melakukan komunikasi yang intensif dengan masyarakat terhadap seluruh program sekolah. Masyarakat dilibatkan secara proaktif dalam penyusunan perencanaan program sekolah, pembahasan program sekolah, pelaksanaan program sekolah, monitoring dan evaluasi program sekolah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program sekolah. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala sekolah sebagai bentuk rasa kebersamaan dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan bukan semata-mata tugas pelaku pendidikan, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat.

Dengan pendekatan yang bijaksana yang dimulai dengan informasi tentang perlunya menggalang kerjasama dalam pembangunan pendidikan. Para kepala sekolah memaparkan problematika pendidikan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Kepala sekolah dapat meminta kepada wakil-wakil masyarakat untuk melaksanakan fungsinya secara lebih baik dalam pendidikan sesuai dengan yang diserukan pemerintah. Dalam suatu pertemuan, satu persatu problem-problem pendidikan itu dibahas. Para wakil masyarakat diberi kesempatan untuk mengemukakan buah pikirannya atau pengalaman-pengalamannya di bidang lain yang mungkin dapat diterapkan dalam pendidikan. Diskusi, adu pendapat, dan debat akan berlangsung sebelum kesepakatan tercapai.

Bila kepala sekolah dapat mewujudkan kerjasama yang baik dengan masyarakat, maka sekaligus ia dapat merealisasikan salah satu lisinya, yaitu sebagai mercu penerang kepada lingkungannya. Ialah menunjukkan contoh yang baik dalam memecahkan masalah secara bergotong royong. Masalah-masalah yang muncul dalam pendidikan merupakan tanggung jawab bersama

antara lembaga pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang harus dipecahkan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi indikator peranan kepala sekolah dalam mewujudkan partisipasi masyarakat adalah pemberian undangan rapat, pengajuan bantuan baik dana maupun tenaga, dan himbauan dukungan moral terhadap pelaksanaan program yang direncanakan oleh sekolah.

SIMPULAN

Berpartisipasi masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dapat berupa :

1. Partisipasi dalam penyusunan rencana program peningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan cara ikut serta dalam pertemuan pembahasan rencana program ,ikut memberi usul dan saran terhadap rencana program sekolah dan ikut serta dalam pengambilan keputusan .
2. Partisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam panitia pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ,ikut serta dalam penyediaan sumber dana pembangunan ,dengan ikut memberikan sumbangan ,baik berupa dana ,material bangunan maupun tenaga.
3. Partisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ditunjukkan dengan ikut sertadalam pertemuan pertanggungjawaban kegiatan ,ikut serta dalam memberikan saran,pendapat,dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan program di masa yang akan datang.
4. Peran kepala sekolah dalam mewujudkan partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan tokoh masyarakat dengan cara memberikan undangan dalam setiap pertemuan yang diadakan lembaga sekolah .
- 5.

DAFTAR PUSTAKA

Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit LP3ES.

Made Pidarta . 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syaiful Sagala. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: Nimas Multima.

Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.